

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP TAHUN 2021**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG**

**Jalan surohadikusumo no 1
PEMALANG**

KATA PENGANTAR

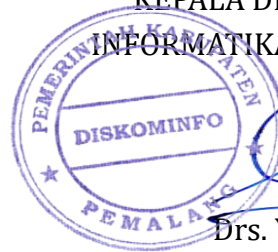
Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG



Drs. YANUAR NITBANI
Pembina Tingkat 1
NIP. 19740323 199303 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dicapai di tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Prioritas Daerah

Sasaran : Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi

Indikator : Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pemalang menargetkan 14 titik hotspot yang terbangun, untuk indikator Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat. Adapun realisasinya adalah 14 titik hotspot telah terbangun. Berdasarkan hal tersebut, maka sebesar 100%.

2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

a) Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

- Indikator 1 : Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan peringkat ke-10, untuk indikator Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik. Adapun realisasinya adalah peringkat ke-33. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2021 adalah sebesar 30,3%.
- Indikator 2 : Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan sub domainnya.

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 100%, untuk indikator Tingkat pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan sub domainnya. Adapun realisasinya adalah 70%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan sub domainnya untuk Tahun 2021 adalah sebesar 70%.

- Indikator 3 : Prosentase layanan Pengaduan Masyarakat secara on line yang ditindaklanjuti

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 100 %, untuk indikator Prosentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti . Adapun realisasinya adalah 84 %. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Prosentase Layanan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti untuk Tahun 2021 adalah sebesar 84 %.

b) Sasaran 2 : Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Indikator 1 : Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 100 % untuk indikator Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar Adapun realisasinya adalah sebesar 85%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar untuk tahun 2021 sebesar 85 %.

- Indikator 2 : Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan nilai 3 untuk indikator Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun realisasinya adalah sebesar 2,49. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Tahun 2021 adalah sebesar 83 %.

- Indikator 3 : Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 70 % untuk indikator Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Adapun realisasinya adalah sebesar 70 %. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi untuk tahun 2021 adalah sebesar 100%.

c) Sasaran 3 : Terintegrasinya Data Antar SKPD/OPD

- Indikator : Prosentase Ketersediaan Statistik Terintegrasi

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 100% untuk indikator Prosentase Ketersediaan Statistik Terintegrasi. Adapun realisasinya adalah sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Prosentase Ketersediaan Statistik Terintegrasi untuk tahun 2021 adalah sebesar 100%.

d) Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja perangkat daerah

- Indikator : Nilai LKJIP (SAKIP)Perangkat Daerah

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 57 untuk indikator Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Adapun realisasinya adalah sebesar 60,89 Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja perangkat daerah untuk tahun 2021 adalah sebesar 100,1 %.

e) Sasaran 5 : Memperkuat Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

- Indikator : Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang Komunikasi dan Informatika

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 100% untuk Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun realisasinya adalah sebesar 100%.Berdasarkan hal tersebut, maka capaian untuk Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2021 adalah sebesar 100%.

f) Sasaran 6 : Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang dimata Publik

- Indikator : Rasio berita positif negative di media minstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 95:5 untuk Rasio berita positif negative di media minstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang. Adapun realisasinya adalah sebesar 99:1. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian untuk Rasio berita positif negative di media minstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2021 adalah sebesar 99%.

g) Sasaran 7 : Meningkatkan akses Masyarakat terhadap Informasi Publik

- Indikator : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan literasi media

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 15 kelompok untuk : Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan literasi media. Adapun realisasinya adalah

sebesar 15 kelompok. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian untuk :
Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan literasi media tahun 2021
adalah sebesar 100 %.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 4 target indikator yaitu:

- a. Prosentase penduduk terlayani mobile broadband (terlayani)
Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 95 % dan terrealisasi sebesar 94 % sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut di atas sebesar 99 %
- b. Proporsi individu yang menggunakan internet
Pada tahun 2020, ditargetkan sebesar 92 % dan terrealisasi sebesar 50,5 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 55 %
- c. Persentase SKPD telah menyusun peraturan layanan informasi publik
Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%
- d. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non litigasi Pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 % .

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan/tantangan yang dihadapi :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a) Belum optimalnya ketersediaan informasi publik;
 - b) Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Publik Pemerintahan Desa;
 - c) Belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d) Belum maksimalnya kerjasama dengan media mainstream;
 - e) Belum memadainya kapasitas sumberdaya komunikasi pemerintah dan masyarakat;
 - f) Banyak sistem elektronik yang berplatform (*Operating System, Database*) yang berbeda;
 - g) Kurangnya SDM yang menguasai teknis *programming*;
 - h) *Networking* untuk *maintenance* sistem elektronik dan infrastruktur komputer.

2. Urusan Persandian
 - a) Belum terpenuhinya tingkat kematangan/maturitas Standar Keamanann Informasi;
 - b) Kurangnya SDM PNS di bidang keamanan syber dan persandian;
 - c) Belum adanya sarana *Security Operating Center (SOC)*;
 - d) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan Perangkat daerah akan keamanan infomasi.
3. Urusan Statistik
 - a) Belum Optimalnya Ketersediaan dan Integrasi Data Statistik Sektoral;
 - b) Kurangnya SDM bidang Statistik yang memiliki kompetensi;
 - c) Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah mengenai Statistik Sektoral.

B. SOLUSI YANG DI LAKUKAN

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a) Mengintensifkan rapat koordinasi pemangku sistem elektronik / OPD untuk mewujudkan integrasi sistem;
 - b) *Interoperability* data ditingkatkan dan dipusatkan ke Diskominfo serta disiapkan *co locationnya*;
 - c) Bekerjasama dengan *provider* Telekomunikasi untuk *recovery* area yang *blank spot* dan Intensitaskan rapat koordinasi pemangku sistem elektronik / OPD untuk mewujudkan integrasi sistem;
 - d) Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi Pemerintah;
 - e) Penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi baik pemerintah dan masyarakat;
 - f) Mengoptimalkan peran Bakohumas dalam penyebarluasan Informasi.
2. Urusan Persandian
 - a) Pemenuhan Standar Keamanan Informasi;
 - b) Pengusulan Formasi PNS untuk JFT Sandiman;
 - c) Pengusulan penambahan bangunan ruangan yang memenuhi standar keamanan informasi;
 - d) Pengusulan Bintek / Pelatihan / sandiman dan Peningkatan SDM dibidang keamanan sandiman.
3. Urusan Statistik
 - a) Membangun metadata indicator pembangunan dan standarisasi Data Sektoral;
 - b) Meningkatkan ketersediaan dan integrasi data statistik sektoral;
 - c) Peningkatan kapasitas perangkat daerah tentang Statistik Sektoral.

Hasil evaluasi yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dipergunakan sebagai bahan perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	10
BAB 1 PENDAHULUAN	11
A. Gambaran Umum	12
i. Struktur Organisasi	12
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	12
B. Isu Strategis	13
C. Keuangan	14
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	15
A. Perencanaan Strategis	15
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	22
B. Perjanjian Kinerja	32
C. Rencana Anggaran	34
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
B. Akuntabilitas Anggaran	67
i. Realisasi Anggaran	67
ii. Analisis Efisiensi Sumber Daya	69
C. Inovasi	
BAB 4 PENUTUP	71
LAMPIRAN	

BAB 1

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

GAMBARAN UMUM

i. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat terdiri dari
 - 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi Publik,
 - 2. Seksi Komunikasi Publik,
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Government,
 - 2. Seksi Pengelolaan aplikasi E-Government,
- e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari:
 - 1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian,
 - 2. Seksi Statistik,
- f. UPTD,
- g. Kelompok Jabatan fungsional

ii. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- c. Belum meratanya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap teknologi informasi;
- d. Belum terintegrasinya data sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
- e. Belum terintegrasinya pengelolaan aplikasi di lingkungan SKPD/OPD Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

2. Urusan Persandian

- a. Masih kurangnya kesadaran keamanan informasi Pejabat Negara dan aparatur Negara;
- b. Adanya kerawanan dan ancaman kerusakan sistem komunikasi elektronik, aplikasi server dan data center;
- c. Adanya kerawanan dan ancaman keamanan jaringan komunikasi pejabat Negara dan OPD Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
- d. Terbatasnya fasilitas peralatan persandian.

3. Urusan Statistik

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya data;
- b. Terbatasnya/sulitnya akses data pembangunan;
- c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral.

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2021 berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 20.018.710.000 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.518.710.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 19.968.710.000 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp. 17.694.884.000 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 5.032.250.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 17.641.884.000. Didukung oleh 5 program, 14 Kegiatan dan 57 kegiatan. Sedangkan belanja langsung yang dari DBHCHT sebesar Rp. 500.000.000- yang didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan.

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 050.3/24/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendukung **Misi yang ke- 1 (satu)** yaitu Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat, dan gotong royong dan **Misi yang ke 6 (Enam)** yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Berikut table penjabaran tujuan dan sasaran program prioritas daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan urusan yang diampu adalah urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

Tabel. 2.1

**Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**

Tujuan	Sasaran	Indikasi sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan Informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hot spot	Na	3	6	9	12	14	14

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran SKPD untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Adapun Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat di dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Tujuan, sasaran dan Indikator Dinas Kominfo 2016 - 2021

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong	Nilai AKIP PD	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	- Nilai LKJIP SAKIP PD	C (52)	C (54)	CC (56)	B (60)	B (60,1)
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan Publik		Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi public	- Peningkatan keterbukaan informasi publik	16	14	14	12	10
			- Tingkat pemenuhan informasi publik pada website pemalang kab.go.id dan website perangkat daerah	70	80	100	100	100
			Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	40	60	80	100	100

		Memperkuat kualitas aparat komunikasi informatika	Prosentase aparatur sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	40	60	80	100	100
		Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	-Tersedianya data center dan NOC dengan berstandar	40	60	80	100	100
			Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Na	3	3	3	3
			Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)	20	40	60	70	70
		Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pematang	60:40	70:30	80:20	90:10	95:5
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	12	13	14	14	14

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)					
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pemalang	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	-Pemeringkatan keterbukaan informasi public	16	14	14	12	10
		-Tingkat pemenuhan informasi public pada website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah	70	80	100	100	100
		-Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	40	60	80	100	100
	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	-Tersedianya data center dan NOC dengan berstandar	40	60	80	100	100
		-Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Na	3	3	3	3
		-Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)	20	40	60	70	70
	Ketersediaan Sistem dan Data Statistik Terintegrasi	Prosentase ketersediaan data statistik terintegrasi	40	60	80	100	100

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Tujuan, sasaran dan Indikator beserta program Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target Tahun 2021	Nama Program	Indikator program	Target Kinerja program Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKjIP (SAKIP PD)	Nilai	B (61)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan Kualitas Aparatur 4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2.Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3.Meningkatnya kualitas aparatur 4.Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaranSKPD 5.Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan	100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan kualitas jaringan	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi	- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara	Persen	100%	Program Penguatan Kelembagaan dalam Komunikasi dan Informasi	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi	14 kelompok

telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	publik.	<p>online yang ditindaklanjuti tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pemenuhan informasi publik pada website Pemalangkab.go.id - Pemeringkatan keterbukaan Infomasi Publik 	<p>Persen</p> <p>Peringkat</p>	<p>100%</p> <p>12</p>	<p>Daerah</p> <p>Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika</p>	<p>masyarakat di Kabupaten Pemalang</p> <p>Prosentase Website OPD yang aktif update data</p> <p>Prosentase OPD yang memiliki Website</p> <p>Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan elektronik</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika 	Persen	100%	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	<p>Prosentase SKPD yang telah memiliki website</p> <p>Prosentase ASN yang trampil di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang 	Persen	90:10	Program kerjasama informasi dengan media massa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah , radio dan televisi - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan 	<p>4 kali</p> <p>4 kali</p>

						<p>pendistribusian informasi nasional melalui baru (on line)</p>	
					Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional	1 kali
						- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal	1 kali
						- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang	3 kali
						Prosentase OPD yang memiliki Website	100%
						Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan elektronik	80%

	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media 	Kelompok	14	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang	14 kelompok
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar - Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks PEGI) - Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi 	Persen	100	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100%
			Nilai	3			
			persen	100%	Program Pengembangan Persandian/Informasi Daerah	Prosentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100%
	Ketersediaan Sistem dan Data Statistik Terintegrasi	Tersedianya Sistem dan Data Statisitik Terintegrasi	Persen	100%	Program Pengembangan Data/Statistik/Informasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Kabupaten dalam angka - Jumlah dokumen kecamatan dalam angka 	<p>100%</p> <p>100%</p>

						- Jumlah dokumen PDRB kecamatan	100%
						- Jumlah dokumen Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten pemalang	100%
						- Jumlah dokumen NTP Kabupaten pemalang	100%
						- Jumlah dokumen indikator penting pembangunan daerah kabupaten pemalang	100%

ii. **Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.6

Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
2	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	- Pemanfaatan TIK dalam kegiatan pelayanan publik secara transparan, cepat dan handal.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrukturasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD. - Meningkatkan peran PPID dalam menghimpun dan mengelola data - Menyusun SOP Standar Layanan Informasi Publik. - Menyediakan sarana informasi publik. - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan informasi publik. - Menyediakan konten layanan informasi publik. - Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

				- Pengembangan layanan informasi.
		Meningkatnya kualitas Aparatur di bidang Komunikasi Informatika	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.	- Meningkatkan keahlian dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD/OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima
		Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Meningkatkan kerjasama informasi dengan media massa Meningkatkan kualitas media milik pemerintah daerah Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk diseminasi program pembangunan, penyediaan database profil wilayah dan meningkatkan pelayanan publik.	Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya Pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Mengembangkan sarana dan prasarana TIK untuk mewujudkan data terpadu	- Membangun data center dan NOC berstandar. - Pengembangan jaringan FO - Fasilitasi pemerintah kepada masyarakat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi - Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras - Menyusun standar basis data-

				<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data.
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan server basis data dan aplikasi
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas
				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan informasi dan aspirasi publik.
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan dan memelihara data center
		Ketersediaan Data Statistik terintegrasi	Mengoptimalkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dan penguatan statistik sektoral
				<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (Perubahan)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat Jawa Tengah	Peringkat	10
		Tingkat pemenuhan informasi publik pada website Pemalangkab.go.id	Persen	100
		Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti	Persen	100
		tepat waktu		
2	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	Persen	100
		Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3
		Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sertifikat	70
3	Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Tersedianya Data Statistik yang terintegrasi	Persen	100

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 20.018.710.000 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.518.710.000 dan Belanja Langsung Rp 19.968.710.000 Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp 17.694.884.000, terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 5.032.250.000 dan belanja langsung Rp 17.641.884.000. Adapun target belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang melalui APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

TARGET BELANJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2021

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.669.257.100	APBD
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.802.014.000	APBD
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 5.871.812.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 156.684.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 195.116.900	APBD

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis,

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Rp. 833.753.000	4,71	Didukung oleh 1 Program Yakni Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Rp. 6.066.928.900	34,28	Didukung oleh 2 Program yakni: 1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
3	Ketersediaan Sistem dan data Statistik terintegrasi	Rp. 156.684.000	0,88	Didukung oleh 1 Program yakni Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Rp. 7.669.257.100	43,34	Didukung oleh 1 Program yakni: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5	Memperkuat Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Rp. 335.896.000	1,89	Didukung oleh 1 Program Yakni Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	Rp. 2.381.063.000	13,45	Didukung oleh 1 Program Yakni Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik	Rp. 251.302.000	1,42	Didukung oleh 1 Program Yakni Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

B. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk Capaian masing-masing indicator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok” dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91 %	Sangat Baik	
2.	76 - 90 %	Tinggi	
3.	66 - 75 %	Sedang	
4.	51 - 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengemban amanah atas pencapaian program prioritas Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Pemalang 2016-2021. **Misi yang ke 6 (Enam)** yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah. Capaian Kinerja untuk Indikator sasaran Program Prioritas daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1:

Capaian Kinerja Program Prioritas Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2021 terhadap Target Akhir 2021
			2019	2020	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	12	14	14	14	100 %	14	100%

Pencapaian target program prioritas daerah yakni cakupan layanan TI bagi masyarakat dengan target jumlah titik hotspot yang terbangun 14 titik pada tahun 2021 telah tercapai 14 titik atau 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yakni Tahun 2021, maka telah tercapai 100 %. Adapun hotspot area yang telah terbangun yakni, di Area hotspot direct area Widuri, Area hotspot Taman Patih Sampun, Area hotspot Taman Kota Comal, Area hotspot Moga, Area hotspot Pulosari, Area hotspot di Kecamatan Watukumpul, Area hotspot di Kecamatan Petarukan, Area hotspot di Kecamatan Ulujami, Area hotspot di Kecamatan Randudongkal, Area hotspot di Kecamatan Bodeh, Balai Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh, Area hotspot GCC, Penggarit, Lapangan Kecamatan Warungpring, Balai Desa Blimbing. Adapun yang hanya jaringannya saja, Area hotspot di Kecamatan Belik dan Area hotspot di Kecamatan Bantarbolang.

D. Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Tabel Capaian Kinerja atas Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang
Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD (2021)	KINERJA s/d 2021 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1.	Meningkatnya layanan informasi dan Aspirasi Publik	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Tengah	10	33	33	10	30,3%
		Tingkat pemenuhan informasi public melalui website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya	100	70	70	100	70%
		Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	84	84	100	84%
2.	Meningkatnya Layanan telekomunikasi dan Informatika	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	100	85	85	100	85%
		Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	2,49	83	3	83
		Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	70	70	100	70	100%
3.	Ketersediaan Data Statistik terintegrasi	Prosentase Ketersediaan Data Statistik terintegrasi	100	100	100	100	100%

SASARAN 1 : Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

Sasaran meningkatnya Layanan Informasi dan aspirasi Publik didukung oleh 3 indikator yakni Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya dan Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2021 terhadap Target Akhir 2021
			2019	2020	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
	Meningkatnya layanan informasi dan Aspirasi Publik	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Tengah	14	30	10	33	33	10	30,3%
		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website Pemalangkab.go.id dan sub domainnya	49	62	100	70	70	100	70%
		Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	57,5	72	100	84	84	100	84%
		Persentase capaian sasaran 1				62%			61%

Adapun penjelasan capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator 1 : Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Formulasi perhitungan : Nilai/Skor Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik. Indikator ini dihitung berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Tahapan penilaian ada tiga yakni tahap pertama pengisian formulir SAQ, tahap kedua verifikasi formulir SAQ dan tinjauan lapangan, dan tahap ketiga Uji Publik. Badan Publik yang telah lolos tahap pertama yakni pengisian formulir SAQ, akan mengikuti tahap berikutnya yakni verifikasi dan tinjauan lapangan dan uji Publik. Selanjutnya hasil evaluasi akan dilakukan pemeringkatan berdasarkan urutan nilai. Tahun 2021 ditetapkan target peringkat ke 10 tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan realisasinya peringkat ke 33 atau 30,3 % dari target yang ditetapkan.

Hasil evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021, menurun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang peringkat ke 30. Permasalahannya disebabkan karena:

1. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia ASN pengelola Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang akan dilakukan antara lain :

1. Meneguhkan kembali Komitmen Perangkat Daerah Terhadap Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara.

Dari sisi kelembagaan, jumlah perangkat daerah yang telah menyusun peraturan tentang keterbukaan informasi ada 70 % . Targetnya pada tahun 2021, seluruh perangkat daerah telah menyusun peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Jumlah pemohon informasi publik yang masuk pada tahun 2021 ada 2 permohonan. Terbagi dalam dua jenis pelayanan yakni on line dan datang langsung kepada PPID utama. Dari pemohon informasi yang ada terselesaikan Sejumlah 2 pemohon, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Indikator Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik didukung oleh satu Program yakni Program Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan rencana anggaran Rp. 202.585.000 dan realisasi Rp. 198.641.610 dengan capaian 98,05%.

2) Indikator 2 : Tingkat pemenuhan informasi publik pada website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya.

Definisi Operasional : Jumlah website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah yang menyediakan Informasi Publik dibandingkan dengan jumlah seluruh website perangkat daerah.

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah yg menyediakan informasi}}{\text{Jumlah seluruh website pemalangkab.go.id dan perangkat daerah}} \times 100\%$$
$$= 35 \text{ PD} : 50 \text{ PD} \times 100\% = 70 \%$$

Tingkat pemenuhan Informasi Publik pada website pemalangkab.go.id beserta sub domainnya digunakan untuk mengukur sejauhmana Pemerintah Kabupaten Pemalang menyediakan layanan informasi public. Pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 100%. Dan realisasinya baru mencapai 70 % dari target yang ditetapkan. Tingkat pemenuhan

informasi publik dihitung dari domain website pemalangkab.go.id dan sub domain website perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan. Jumlah website perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan ada 50 buah. Dari 50 website yang ada, yang aktif 35 dan 15 website pada tahun 2021 tidak aktif.

Untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut ada satu Program Pendukung yakni Program Informasi dan Komunikasi dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Sub.Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik rencana anggaran Rp. 570.378.000 dan Realisasi Rp. 564.611.746 dan capaian 98,99%.

3) Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti

Formulasi Perhitungan: Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah aduan masyarakat yang masuk.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah aduan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$$
$$= 290 : 345 \times 100 \% = 84\%$$

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 84% aduan ditindaklanjuti. Jumlah aduan masyarakat Kabupaten Pemalang melalui sarana “ HALLO BUPATI ” dan LAPOR SP4N selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 sejumlah 345 aduan. Dari 345 aduan tersebut sejumlah 290 aduan (84%) telah ditindaklanjuti dan 55 aduan belum ditindaklanjuti. Masih ada 16 % aduan yang belum ditindaklanjuti.

Adapun rekapitulasi aduan masyarakat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 BB

REKAP PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI HALO BUPATI PER BULAN TAHUN 2021

No.	Bulan	Jumlah	Terjawab	Tidak
1.	Januari	5	5	0
2.	Februari	9	8	1
3.	Maret	69	64	5
4.	April	37	36	1
5.	Mei	30	27	3
6.	Juni	25	24	1
7.	Juli	28	26	2
8.	Agustus	31	20	11
9.	September	38	35	3
10.	Oktober	16	11	5
11.	November	56	33	23
12.	Desember	1	1	0
	Jumlah	345	290	55

Tabel. 3.5**DAFTAR REKAPITULASI ADUAN MASYARAKAT
HALO BUPATI PEMALANG TAHUN 2021**

NO.	JENIS ADUAN	JUMLAH ADUAN	ADUAN YG TERJAWAB	ADUAN YANG TIDAK TERJAWAB
1	Infrastruktur Jalan	53	51	2
2	Bantuan Sosial	21	18	3
3	Lainnya terkait Kesehatan	19	14	5
4	Bansos daerah (Pemprov, Kab/Kota)	14	11	3
5	Topik Lainnya	12	3	9
6	Jalan Berlubang	10	7	3
7	Pelayanan Vaksinasi / Imunisasi	10	9	1
8	Bansos PKH	6	6	0
9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	3	3
10	PKH Program Keluarga Harapan	6	4	2
11	Permukiman	5	5	0
12	Bantuan Sosial Tunai (BST)	5	4	1
13	Ketertiban Umum	5	5	0
14	Akta Kelahiran	5	5	0
15	Lainnya	5	3	2
16	Kartu Keluarga	5	4	1
17	Lainnya terkait Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	5	5	0
18	Pasar	5	5	0
19	Lainnya terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	0
20	Lainnya terkait Sosial dan Kesejahteraan	4	4	0
21	KTP (Kartu Tanda Penduduk)	4	4	0

22	Lainnya terkait Infrastruktur Jalan	4	3	1
23	Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4	4	0
24	Pupuk	4	3	1
25	Bantuan Pangan Non Tunan (BPNT)	4	4	0
26	Lainnya terkait Pendidikan dan Kebudayaan	4	3	1
27	Jaga Jarak Aman (Social Distancing)	3	3	0
28	Lainnya terkait Bantuan Sosial	3	3	0
29	Pemerintahan Desa	3	3	0
30	Anggaran dan Perbendaharaan	3	3	0
31	Pelayanan Kesehatan	3	3	0
32	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)	3	2	1
33	Kartu Indonesia Pintar (KIP)	3	3	0
34	Keluhan BST Covid	3	3	0
35	Pemeriksaan PCR atau Swab	3	2	1
36	Penanggulangan Bencana	3	3	0
37	Biaya/Tarif PDAM	3	3	0
38	Lainnya terkait Pertanahan	3	2	1
39	Transportasi Darat	2	2	0
40	Bantuan Pertanian	2	1	1
41	Dana Desa	2	2	0
42	Lainnya terkait Perhubungan	2	2	0
43	Tenaga Kesehatan atau Instansi Kesehatan	2	1	1
44	Gaji Pekerja	2	2	0
45	UMKM	2	2	0
46	Lainnya terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	1	1
47	Pendidikan Dasar dan Menengah	2	2	0

48	Infrastruktur Pendukung	2	2	0
49	Gangguan Layanan Penyaluran Air	2	1	1
50	Lainnya terkait Kepegawaian	2	2	0
51	Banjir	2	2	0
52	Pengaduan Hotline/Call Center 117	2	2	0
53	Pengaduan Website tentang COVID-19	2	2	0
54	Lainnya terkait Kelautan dan Perikanan	1	0	1
55	Perumahan Bersubsidi dan Rumah Susun	1	1	0
56	Tes Pra Kerja	1	1	0
57	Informasi Bansos Daerah Covid	1	1	0
58	SP4N-LAPOR!	1	1	0
59	Lapangan Olahraga	1	0	1
60	Keluhan BLT Desa	1	1	0
61	Agama	1	1	0
62	Kartu Indoneisa Sehat (KIS)	1	1	0
63	Informasi	1	0	1
64	Lainnya terkait Pelayanan Kesehatan	1	1	0
65	Layanan Air Minum	1	1	0
66	Pengaduan Website COVID-19	1	1	0
67	Antrian mendapatkan pelayanan	1	1	0
68	Kurangnya informasi tentang ketersediaan tempat tidur	1	0	1
69	Lainnya terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	0
70	Biaya Perawatan Pasien COVID-19	1	1	0
71	Pangan	1	1	0
72	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	1	0
73	Kekayaan Negara dan Lelang	1	0	1
74	Alur pelayanan tidak jelas	1	1	0

75	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	1	0
76	Pemulihan Ekonomi Nasional	1	0	1
77	Pencemaran Lingkungan	1	1	0
78	Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	1	0	1
79	Lainnya terkait Hak Pekerja	1	1	0
80	Lainnya terkait Jaminan Sosial Kesehatan	1	0	1
81	Longsor	1	1	0
82	Kartu Prakerja	1	1	0
83	Bendungan	1	1	0
84	Bansos Digital 2021	1	1	0
85	Lainnya terkait Penanggulangan Bencana	1	1	0
86	Pertanian dan Peternakan	1	0	1
87	Sengketa Tanah	1	1	0
88	Kesehatan	1	1	0
89	Pungutan Liar	1	1	0
90	Lainnya terkait Layanan Air Minum	1	1	0
91	Drainase (Gorong-Gorong/Parit)	1	1	0
92	Bibit Pertanian	1	1	0
93	Jaringan Internet	1	1	0
94	Jembatan	1	0	1
95	Lainnya terkait Kependudukan	1	1	0
96	Informasi BST Covid	1	1	0
97	Pindah Domisili	1	1	0
98	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	1	0
99	Sertifikat Tanah	1	1	0
100	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1	1	0

101	Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	1	0
102	Peternakan	1	1	0
103	Biaya Sekolah	1	1	0
	JUMLAH	345	290	55

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi capaian indikator Prosentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020, realisasi mencapai 72 % aduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Sedangkan tahun 2021 sebesar 84%.

Tidak tercapainya target prosentase layanan pengaduan masyarakat secara *online* yang ditindaklanjuti secara tepat waktu disebabkan karena tindak lanjut perangkat daerah dalam merespon aduan masyarakat belum sesuai standar. Solusi yang dilakukan antara lain adalah menguatkan *monev* tindak lanjut dari pengaduan pada perangkat daerah.

Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik rencana anggaran Rp. 60.790.000., realisasi Rp. 57.757.400 dan capaian 95,01%.

SASARAN 2 : Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika.

Untuk mencapai sasaran kedua yakni Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, diukur dari tiga indikator yakni, Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar, Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Tabel. 3.6

**Pengukuran Kinerja Sasaran 2 : Terwujudnya pengembangan infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2019	2020	Target	Capaian	%		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	80	85	100	85	85	100	85
		Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,11	2,91	3	2,49	83	3	83
		Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	60	70	70	70	100	70	100
		Persentase capaian sasaran 2				52,5			89,3

Adapun rincian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar

Definisi Operasional = Jumlah server yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan server

Rumus perhitungan= Jumlah server yang tersedia

----- x 100

Jumlah kebutuhan server

= 47: 56 x 100% = 85%

Tersedianya data center dengan NOC berstandar merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) komunikasi dan informatika. Tahun 2021 ditetapkan target 100%. Dari target yang ditetapkan terealisasi 85 % . Dengan demikian untuk target tersedianya data center dengan NOC berstandar, realisasinya 85%. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra tahun 2021 yakni 100 %, maka capaian tahun 2021 capaiannya masih 85 %.

Data Center telah tersedia dengan lokasi di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun demikian belum semua perangkat daerah menitipkan servernya di Data Center yang telah tersedia. Terkait dengan standarisasi, Data Center Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya saat ini belum memenuhi standar yang diakui secara internasional yakni ISO/IEC 27001:2009

Permasalahan yang ada dalam pencapaian indikator ini adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia ASN Pengelola Data Center. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan upaya pengusulan formasi ASN untuk formasi jabatan Pengelola Data Center pada Tahun 2019.

Adapun Program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:
Program Aplikasi Informatika.

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, rencana anggaran Rp. 4.185.500.000, realisasi Rp. 4.176.409.361 capaian 99,78%.

2. Penilaian Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik

Definisi Operasional: Nilai/Skor yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

Penilaian Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana implementasi E-Government di Kabupaten Pematang Jaya, dilihat dari ketersediaan infrastruktur baik lunak maupun keras, ketersediaan aplikasi. Sebelum ada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, penilaiannya disebut dengan indeks E-Government Indonesia atau Indeks PEGI (Penilaian E- Government Indonesia). Tahun 2021 target yang ditetapkan mendapatkan nilai/skor 3 dan mendapatkan nilai/skor 2,49, sehingga realisasinya 83%. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yakni 3, maka capaiannya sudah 83%. Tidak tercapainya target capaian Nilai SPBE, salah satunya adalah integrasi sistem aplikasi. Sementara kondisi di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya saat ini banyak system elektronik yang berplatform berbeda susah untuk diintegrasikan. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengintensifkan koordinasi dengan pemangku system elektronik perangkat daerah untuk mewujudkan integrasi sistem.

Program yang mendukung adalah:

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Sub.Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, rencana anggaran Rp. 139.143.000, realisasi Rp. 138.867.535 capaian 99,80%.
- c. Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, rencana anggaran Rp. 602.400.000, realisasi Rp. 595.338.500 capaian 98,83.

- d. Sub.Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik, rencana anggaran Rp. 244.824.000, realisasi Rp. 244.241.636 capaian 99,76%.
- e. Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, rencana anggaran Rp. 78.806.000, realisasi Rp. 78.656.000 capaian 99,81%.
- f. Sub.Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, rencana anggaran Rp. 509.520.000, realisasi Rp. 508.718.330 capaian 99,84%.
- g. Sub.Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, rencana Anggaran Rp. 111.619.000, realisasi Rp. 111.608.579 capaian 99,99%.

3. Indikator Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi

Definsi Operasional= Penilaian Indeks SMPI

Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi merupakan indicator yang digunakan untuk mengukur keamanan informasi pemerintah daerah. Pada Tahun 2020 ditetapkan target sebesar 70%, dan realisasinya 70 % atau 100 % dari target. Dan dibandingkan dengan target akhir Renstra 70%, maka capaiannya telah memenuhi 100 %.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, penilaian dalam indeks Keamanan Informasi dilakukan dengan cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2009, yang disusun menjadi 5 (lima) area yakni :

1. Tata Kelola Keamanan Informasi

Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi /fungsi, tugas dan tanggungjawab pengelola keamanan informasi

2. Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan resiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi

3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi

Mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya

4. Pengelolaan Asset Informasi

Mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap asset informasi termasuk keseluruhan siklus penggunaan asset tersebut

5. Teknologi dan Keamanan Informasi

Mengevaluasi kelengkapan konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan asset informasi.

Berdasarkan hasil Assesor yang dilakukan oleh BSSN dan Studi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang bekerjasama dengan PT Pilar Teknotama Yogyakarta, didapatkan informasi bahwa sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya diterapkan untuk memenuhi kriteria atau acuan indeks KAMI dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016.

Permasalahan terkait pencapaian indicator sasaran ini antara lain:

1. Kurangnya SDM PNS di bidang keamanan syber dan persandian
2. Belum adanya sarana Security Operating Center (SOC)
3. Belum adanya Peraturan mengenai Tata kelola keamanan Informasi
4. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan Perangkat daerah akan keamanan infomasi

Solusi untuk permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah
2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Keamanan Informasi
3. Mengusulkan ASN Sandiman dan Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Informasi
4. Mengusulkan Pembangunan Ruang Security Operating System setelah SDM Sandiman Terpenuhi.

Adapun Program yang mendukung adalah:

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub.Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, rencana anggaran Rp. 129.354.000, realisasi Rp. 128.919.100 capaian 99,66%.
- b. Sub.Kegiatan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, rencana anggaran Rp. 65.762.900, realisasi Rp. 65.549.900 capaian 99,68%.

SASARAN 3 :

Ketersediaan Sistem dan Data Statistik terintegrasi

Tabel. 3.7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2019	2020	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Tersedianya Sistem dan Data Statistik terintegrasi	Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	90	100	100	100	100	100	100 %
		Persentase capaian sasaran 2				100			100

Pengukuran Kinerja Sasaran 3 : Terintegrasinya Data Antar SKPD/ OPD

Definisi Operasional : Jumlah Data Statistik Terintegrasi dibandingkan jumlah keseluruhan data Statistik Sektoral

Rumus Perhitungan : Jumlah Data Statistik Terintegrasi

$$\frac{\text{Jumlah Data Statistik Terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh data statistic sektoral}} \times 100 \%$$

Jumlah seluruh data statistic sektoral

$$= 9/9 \times 100 = 100$$

Prosentase data antar SKPD/ O data PD yang terintegrasi merupakan indikator yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya sasaran Terintegrasinya data SKPD/OPD.

Indikator Prosentase data antar SKPD/ OPD yang terintegrasi tahun 2020 ditetapkan target 100% dan realisasinya 100% atau 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka realisasinya baru 100%. Indikator Jumlah dokumen (Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka, PDRB kecamatan, Indeks Harga Konsumen dan laju inflasi, NTP Kabupaten Pematang Jaya, Indikator penting pembangunan daerah Kabupaten Pematang Jaya) Tahun 2019 target 6 dokumen dan realisasinya 6 dokumen atau 100%. Pada tahun 2018, telah disusun Metadata Pembangunan sebagai panduan bagi produsen data di dalam mengukur data indikator pembangunan. Dan aplikasi Pematang Jaya Dalam Genggaman berbasis android dan web.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Belum Optimalnya Ketersediaan dan Integrasi Data Statistik Sektoral
2. Kurangnya SDM bidang Statistik yang memiliki kompetensi
2. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah mengenai Statistik Sektoral

Adapun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan dan integrasi data statistic sektoral
2. Peningkatan kapasitas perangkat daerah tentang Statistik Sektoral.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan statistik Sektoral di Lingkup Daerah kabupaten/Kota

- a. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, rencana anggaran Rp. 26.241.000 realisasi Rp. 23.894.250 capaian 91,06%.
- b. Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, rencana anggaran Rp. 48.000.000 realisasi Rp. 43.310.500 capaian 90,23%.
- c. Sub.Kegiatan Membangun Metadata statistik Sektoral, rencana anggaran Rp. 82.443.000 realisasi Rp. 80.507.267 capaian 97,65%.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Selain Indikator Kinerja Utama

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja sasaran Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2021 terhadap Target Akhir 2021
			2019	2020	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKjIP (SAKIP)	56,2	59,83	60,1	60,89	60,89	60,1	101

Nilai SAKIP digunakan untuk mengukur sasaran kinerja Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah 59,83. Apabila dibandingkan dengan target di Tahun 2021 B (60,1), maka

capaiannya 60,89%. Perolehan nilai SAKIP tahun 2021 ini naik apabila dibandingkan dengan hasil tahun 2020 sebesar 1,06%.

Adapun program yang mendukung tercapainya sasaran di atas antara lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, rencana anggaran Rp. 49.581.000, realisasi Rp. 47.134.000 capaian 95,06%.
- b. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, rencana anggaran 16.040.000, realisasi 15.230.000 capaian 94,95%.
- c. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, rencana anggaran Rp. 12.300,000, realisasi Rp. 12.300.000 capaian 100%.
- d. Sub.Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, rencana anggaran Rp. 159.348.000, realisasi anggaran Rp. 155.285.000 capaian 97,45%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, rencana anggaran Rp. 5.032.250.000, realisasi Rp. 4.848.497.689 capaian 87,86%.
- b. Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, rencana anggaran Rp. 40.900.000 realisasi Rp. 40.850.000 capaian 99,88%.
- c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, rencana anggaran Rp. 3.605.000,realisasi Rp. 3.605.000 capaian 100%.
- d. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, rencana anggaran Rp. 26. 744.000 realisasi Rp. 26.503.000 capaian 99,10%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub.Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, rencana anggaran Rp. 10.000.000 realisasi Rp. 9.198.000 capaian 91,98%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub.Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, rencana anggaran Rp. 3.000.000 realisasi Rp. 2.323.500 capaian 77,45%.
 - b. Sub.Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, rencana anggaran Rp. 25.000.000 realisasi Rp. 25.000.000 capaian 100%.
 - c. Sub.Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, rencana anggaran Rp. 183.866.000 realisasi Rp. 182.989.323 capaian 99,52%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor, rencana anggaran Rp. 80.000.000 realisasi Rp. 79.999.600 capaian 100%
 - b. Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, rencana anggaran Rp. 33.757.600 realisasi Rp. 33.699.500 capaian 99,83%.
 - c. Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor, rencana anggaran Rp. 155.325.000, rencana anggaran Rp. 155.258.296 capaian 99,96%.
 - d. Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, rencana anggaran Rp. 122.013.000 realisasi Rp. 122.013.000 capaian 100%.
 - e. Sub.Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, rencana anggaran Rp. 13.150.400 realisasi Rp. 13.150.000 capaian 100%.
 - f. Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material, rencana anggaran Rp. 130.000.000 realisasi Rp. 130.000.000 capaian 100%.
 - g. Sub.Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, rencana anggaran Rp. 20.130.000 realisasi Rp. 20.125.000 capaian 99,98%.
 - h. Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, rencana anggaran Rp. 58.950.500 realisasi Rp. 50.998.430 capaian 86,51%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
- a. Sub.Kegiatan Pengadaan Mebel, rencana anggaran Rp. 11.303.000, realisasi Rp. 11.250.000 capaian 99,53%.
 - b. Sub.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, rencana anggaran Rp. 110.474.000 realisasi Rp. 110.300.300 capaian 99,84%.

- c. Sub.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya, rencana anggaran Rp. 147.386.400 realisasi Rp. 147.349.100 capaian 99,97%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub.Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat, rencana anggaran Rp. 97.000.000 realisasi Rp. 78.160.000 capaian 80,58%.
- b. Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, rencana anggaran Rp. 286.602.000 realisasi Rp. 266.251.460 capaian 92,90%.
- c. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, rencana anggaran Rp. 35.000.000 realisasi Rp. 34.981.000 capaian 99,95%.
- d. Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, rencana anggaran Rp. 170.211.200 realisasi Rp. 134.303.473 capaian 78,90%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, rencana anggaran Rp. 258.100.000 realisasi Rp. 250.906.800 capaian 97,21%.
- b. Sub.Kegiatan Pemeliharaan Mebel, rencana anggaran Rp. 15.000.000 realisasi Rp. 14.991.000 capaian 99,94%.
- c. Sub.Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, rencana anggaran Rp. 67.280.000 realisasi Rp. 67.104.400 capaian 99,74%.
- d. Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, rencana anggaran Rp. 200.000.000 realisasi Rp. 199.917.478 capaian 99,96%.
- e. Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, rencana anggaran Rp. 94.940.000 realisasi Rp. 94.053.650 capaian 99,07%.

SASARAN 2

Memperkuat Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Tabel : 3.9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2021 terhadap Target Akhir 2021
			2018	2019	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Memperkuat Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	80	62	100	50	100	100	100

Pencapaian Kinerja sasaran Memperkuat Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

Definisi Operasional : Jumlah Aparatur Sipil yang trampil di bidang Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan Jumlah Aparatur Pengelola Komunikasi dan Informatika.

Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan Informatika merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran memperkuat kualitas aparatur komunikasi dan Informatika. Target tahun 2021 sebesar 100% dan realisasi 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 antara lain, sosialisasi kehumasan, dan Bimbingan Teknis Jurnalistik.

Adapun Program yang mendukung sasaran ini antara lain :

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub.Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, rencana anggaran Rp. 239.896.000 realisasi Rp. 239.214.157 capaian 99,72%.
- b. Sub.Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, rencana anggaran Rp. 96.000.000 realisasi Rp. 95.390.100 capaian 99,36%.

SASARAN 3

Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik

Tabel. 3.11

Pencapaian Kinerja sasaran membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2021 terhadap Target Akhir 2021
			2019	2020	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di mata Publik	Rasio berita positif dan negative di media mainstream tentang Kabupaten Pemalang	80:20	40:60	95:5	99:1	99	90:10	99

Definisi Operasional: Jumlah berita positif dan negative dibandingkan seluruh berita tentang Kabupaten Pemalang

Rasio berita positif dan negative di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan indikator yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di mata Publik. Tahun 2021 ditetapkan target Rasio berita positif dan negative di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang 95:5 dan realisasi 99:1 atau 99%. Program yang mendukung sasaran ini adalah:

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Sub.Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, rencana anggaran Rp. 1.011.598.000 realisasi Rp. 1.005.160.500 capaian 99,36%.

- b. Sub.Kegiatan Layanan Hubungan Media, rencana anggaran Rp. 1.119.595.000, realisasi anggaran Rp. 1.111.046.326 capaian 99,24%.
- c. Sub.Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, rencana anggaran Rp. 55.000.000 realisasi Rp. 54.442.500 capaian 98,99%.
- d. Sub.Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, rencana anggaran Rp. 194.870.000 realisasi Rp. 194.870.000 capaian 100%.

SASARAN 4

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik

Tabel. 3.12
Pencapaian Kinerja sasaran Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun		Tahun 2021			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2021 terhadap Target Akhir 2021
			2018	2019	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	14	15	14	15	107	14	107

Definisi Operasional : Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina di tingkat Kecamatan.

Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 14 kelompok

berbasis kecamatan. Realisasi sudah semua kecamatan yang telah terbentuk KIM atau 107%.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, rencana anggaran Rp. 251.302.000 realisasi Rp. 250.369.458 capaian 99,63%.

D. Pengukuran Kinerja Indikator SDGiS

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan *Sustainable Development Goals*(SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 4 target indikator yaitu:

a. Prosentase penduduk terlayani mobile broadband (terlayani)

Definisi Operasional : Jumlah penduduk terlayani mobile broadband dibandingkan jumlah seluruh penduduk

Pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 94 % sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut di atas sebesar 99 %

b. Proporsi individu yang menggunakan internet

Definisi Operasional: Jumlah penduduk yang menggunakan internet dibandingkan jumlah seluruh penduduk

Pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 92 % dan terealisasi sebesar 50,5 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 55 %

c. Persentase SKPD telah menyusun peraturan layanan informasi publik

Definisi Operasional : Jumlah SKPD yang menyusun peraturan Layanan Informasi Publik dibandingkan jumlah seluruh SKPD

Pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %.

- d. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi non litigasi

Definisi Operasional: Jumlah sengketa informasi yang selesai dibandingkan jumlah seluruh sengketa informasi.

Pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %

A. AKUNTABILITAS ANGGARAN

i. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tabel. 3.13
Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Tidak Langsung	
	a. Belanja Pegawai	5.032.250.000,-
2.	Belanja Langsung	
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.907.805.200
	c. Belanja Modal	704.828.800,-

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis

tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategi

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1.	Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	833.753.000	821.010.756	98,4%
2.	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika	6.066.928.900	6.048.308.941	99,6%
3.	Ketersediaan Sistem dan Data Statistik Terintegrasi	156.684.000	147.712.017	94,2%
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Informasi dan Komunikasi	7.669.257.100	7.383.727.999	96,2%
5.	Memperkuat Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	335.896.000	334.604.257	99,6%
6.	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	2.381.063.000	2.365.519.326	99,3%
7.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik	251.302.000	250.369.458	99,6%
Jumlah		17.694.884.000	17.351.252.754	98,06

Sumber : Laporan Kinerja Keuangan Tahun 2021

i. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Penyerapan Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	3	62	821.010.756	98,4%	100%
2	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi dan Informatika Informasi dan Komunikasi	3	52,5	6.048.308.941	99,6%	100%
3	Ketersediaan Sistem dan Data Statistik Terintegrasi	1	100	147.712.017	94,2%	100%
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Informasi dan Komunikasi	1	96,28	7.383.727.999	96,2%	100%
5	Memperkuat Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	1	100	334.604.257	99,6%	100%
6	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	1	99	2.365.519.326	93,3%	100%
7	Meningkatnya akes masyarakat terhadap informasi Publik	1	107	250.369.458	99,6%	100%

Sumber : Laporan keuangan Diskominfo Tahun 2021

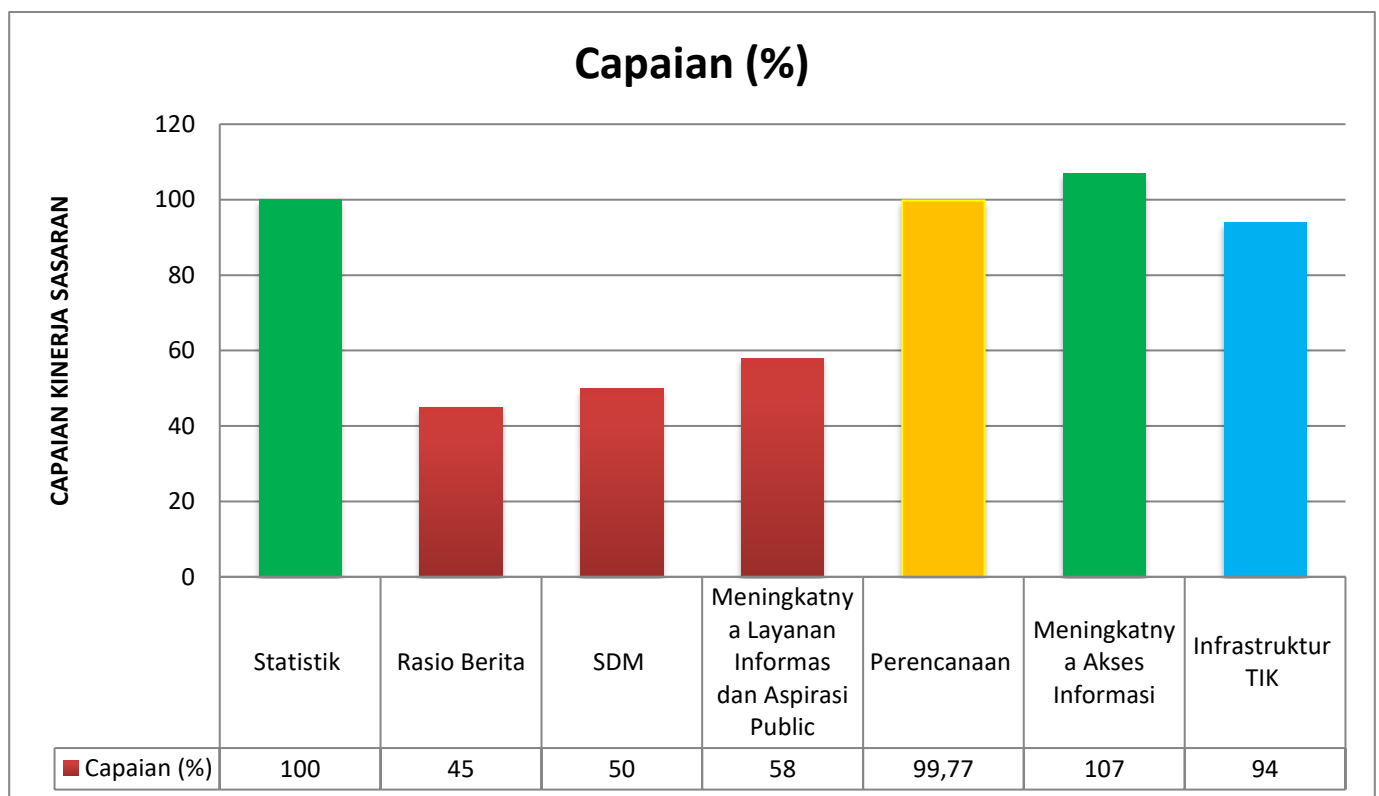
Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2021, sasaran di Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki efisiensi sumber daya.

BAB 4 Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

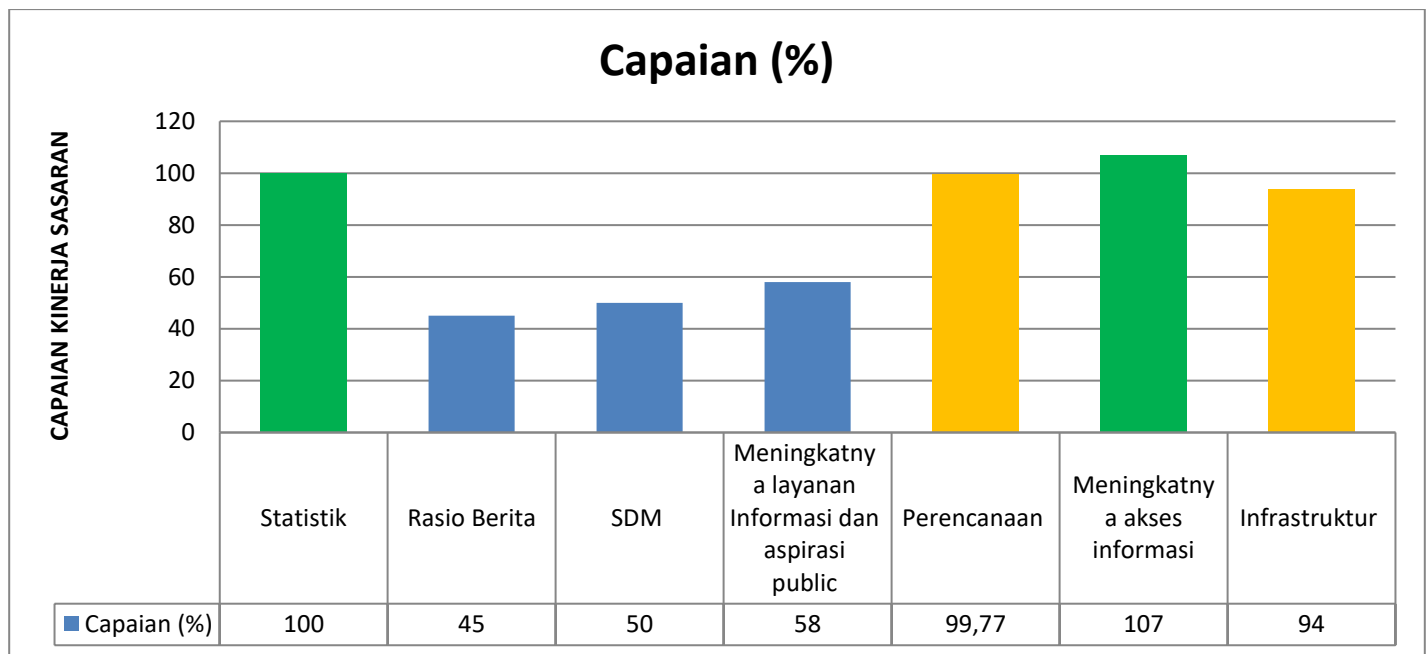
Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Capaian Kinerja, dari 7 sasaran strategis, nilai perangkat kinerjanya kategori sangat baik (sesuai kategori).
2. Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Skala Peringkat Kinerja



3. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 100%, dari 7 sasaran strategis, terdapat 28,5% (2 sasaran) yang capaian kinerjanya 100%, dan 28,5% (2 sasaran) yang capaian kinerjanya 90-99%, dan 28,5% (2 sasaran) yang capaian antara 51-65%, dan 14,3% (1 sasaran) yang kinerjanya di bawah 51 %.

Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Pemenuhan Capaian Kinerja 100%



Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi dan Informatika melalui penyediaan jaringan Fiber Optik, dan standarisasi data center.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik melalui penyediaan konten informasi yang berkualitas
- c. Meningkatkan Ketersediaan data statistik yang terintegrasi melalui interoperabilitas data dan sistem

- d. Meningkatkan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi secara bertahap
- e. Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui monev secara berkala.

Pemalang, Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

Drs. YANUAR NITBANI
Pembina Tingkat I
NIP. 19740323 199303 1 001

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja tahun 2021 Perubahan
2. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021
3. Hasil Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tahun 2021
4. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020
5. Hasil Evaluasi SAKIP 2020 dari Bagian Organisasi

Dalam File tersendiri